BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkandari hasil pembahasan yang telah di bahas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat belum seluruhnya berjalan dengan baik.

1. Proses komunikasi yang terjadi baik pada Dinas Sosial maupun Dinas terkait dalam penyampaiannya informasi mengenai program yang dilaksanakan sudah melaui cara yang benar, namun demikian informasi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada para penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para penyandang cacat yang belum mengetahui tentang informasi-informasi tersebut.
2. Ketersediaan Sumber Daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangat minim sehingga mempengaruhi belum terlaksananya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dengan baik.
3. Disposisi pada Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerjaserta Dinas Perhubungan baiksikap pelaksana maupun tingkat kepatuhan pelaksana sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari sudah adanya

komitmen yang tinggi dari aparatur Dinas tersebut untuk melaksanakan programnya masing-masing.

4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan, sudah sangat jelas dan memuat pembagian-pembagian tugas atau kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan hendaknya dapat meningkatkan proses penyampaian informasi atau lebihsering lagi melakukan sosialisasi kepada para penyandang cacat terkait program yang dilaksanakan, agar informasi tersebut dapat diketahui oleh penyandang cacat dengan merata.
2. Dinas Sosial Kota Bandung hendaknya dapat menambah aparatur,minimnya aparatur yang ada pada Dinas Sosial sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan yang dilaksanakan.
3. Komitmen dari aparatur yang sudah dimiliki oleh dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan hendaknya dipertahankan.

4. Perlu adanya peningkatan dalam kerjasama dengan Dinas-dinas yang bersangkutan terutama dalam penyediaan fasilitas publik bagi penyandang cacat.
5. Perlu adanya pemeliharaan secara konsisten terutama aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Perhubungan terhadap fasilitas publik yang sudah disediakan bagi penyandang cacat seperti pedestrian dan *halte*, karena banyak dari fasilitas tersebut sudah mengalami kerusakan dan belum di tindak lanjuti.
6. Pihak penyedia fasilitas harus lebih tegas dan memberi sanksi kepada masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas bagi penyandang cacat.
7. Perlu adanya keterlibatan dari semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat, Dinas terkait maupun para penyandang cacat, untuk SAmewujudkan adanya kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat.